

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Kencana, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dyah Octorino Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Hanafi Norcholis, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemahkan Rasul Muttakin, Nusa Media, Cetakan ke IV, Bandung, 2010.
- Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- I Gede Pantja Astawa dalam Ateng Syafrudin, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2014.
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Jimly Assidique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.
- Magnis Suseno, *Etika Publik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*.
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Rajawali, Jakarta, 2011.
- Muhamad Sadi Is, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, 2021.
- Nur Basuki, Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Surabaya, 2009.
- Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika Bandung, 2000.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015.

- Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta 2001.
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pasar ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif Dan Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metedologi Riserch*, Andy Offset, Yogyakarta, 1997.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2012.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Zoelva Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020.
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum* Jurnal Legislasi Indonesia, Nomor 8, Volume 16 Nomor 3 Edisi, Tahun 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto, *Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro, Nomor 2, Volume 2, Tahun 2020.

Thalhah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No 3 Vol 16 Juli 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Amademen Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease-2019.

D. Artikel

chartapolitika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:kabinet-profesional-dan-sistem-presidensial&catid=38:yuniarto-widjaya., diakses pada 28 Desember 2022, pukul 09:22.

Wikipedia, "Pandemi Covid-19", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19, Tanggal 29 Desember 2022, Pukul 14.35 WIB.

<https://ihza-ihza.com/instruksi-mendagri-no-6-tahun-2020-dan-pemberhentian-kepala-daerah/>, diakses pada 31 Desember 2022, Pukul 20.30 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5552659/update-lengkap-data-kasus-corona-di-ri-30april-2021>, Diakses pada 29 Desember 2022, Pukul 14.50 WIB.

<https://kompolnas.go.id/index.php/blog/pesta-ulang-tahun-khofifah-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 09.20 WIB.

<https://kompolnas.go.id/index.php/blog/pesta-ulang-tahun-khofifah-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 09.20 WIB.

Wkipedia,https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Dalam_Negeri_Republik_Indonesiamenjadi%20%22kementerian%22Tugas%20dan%20fungsi,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara, Diakses 28 Desember 2022, Pukul 09.40.